

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Penduduk dalam suatu negara merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan pembangunan. Besarnya jumlah penduduk yang ada, tentunya menimbulkan permasalahan tersendiri yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam suatu negara tersebut, mulai dari masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, hingga tindakan kriminal. Menurut data yang disampaikan oleh laman *tumoutounews*, Indonesia merupakan Negara terpadat penduduknya ke empat setelah Tiongkok (China), India dan Amerika dengan jumlah penduduk 257.912.349 jiwa. (<http://tumoutounews.com/2017/08/25/download-jumlah-penduduk-dunia-tahun-2017/> diakses pada 13 Januari 2018)

Dengan adanya Indonesia yang terletak diposisi ke empat memperlihatkan bahwa Indonesia termasuk negara yang masih sering terlibat dengan masalah-masalah kependudukan seperti diatas. Namun pada hakikatnya permasalahan tersebut dapat diminimalisir melalui seberapa besar peranan dari satuan terkecil dalam ruang lingkup sosial yaitu keluarga. Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi saat ini, membangun ketahanan keluarga merupakan salah satu fokus pemerintah agar terbentuk pribadi yang berlandaskan Nawacita.

Keluarga adalah tempat dimana pertama kali individu mendapat pendidikan dan pengalaman interaksi, secara lebih luas keluarga juga

merupakan dasar terbentuknya karakteristik seseorang yang akan berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat. Lemahnya pertahanan keluarga sebagai pondasi pembentukan karakter dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan yang merusak sistem dan tatanan sosial. Seperti permasalahan KDRT, perceraian, kasus anak terlantar, kasus kenakalan remaja, tawuran dan seks bebas. Dari berbagai permasalahan tersebut sebenarnya dapat dipastikan bahwa adanya ketidaksiapan pasangan dalam membangun rumah tangga ataupun keluarga serta kurangnya pemantauan dan peran dari anggota keluarga lainnya, seperti contohnya suatu pernikahan dini.

Menurut UNICEF (2016: 9-10) pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum dewasa dan matang berdasarkan undang-undang maupun dalam perspektif psikologis. Perkawinan usia muda tersebut melanggar beberapa hak asasi anak atau Konvensi Hak Anak (KHA). Konvensi Hak Anak atau biasa disebut KHA mendefinisikan setiap orang dibawah 18 tahun sebagai anak dan berhak atas semua perlindungan anak, sehingga perkawinan usia anak melanggar sejumlah hak asasi manusia yang dijamin oleh KHA yaitu diantaranya adalah hak atas pendidikan, hak atas hak untuk hidup bebas dari kekerasan, hak atas kesehatan, hak untuk dilindungi dari eksploitasi dan hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua mereka (dipisahkan dengan orang tua bertentangan dengan keinginan mereka).

Beberapa pertimbangan hukum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia, menegaskan bahwa UU Perkawinan No. 01 Tahun 1974 menjelaskan batas usia minimal menikah bagi perempuan 16 tahun dan lelaki 19 tahun. "Secara nyata peraturan itu membuat setiap perempuan Indonesia boleh dikawinkan saat usia anak atau belum dewasa," ujar Indry Koordinator Pokja Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indonesia. (<http://nasional.kompas.com/read/2017/12/18/15413921/ketentuan-batas-usia-nikah-di-uu-perkawinan-mendiskriminasi-kaum-perempuan> diakses 13 januari 2018). Jika kita amati dengan jelas ada banyak faktor peraturan ataupun program pemerintah lainnya yang harus diperhatikan bagi sebuah keluarga ataupun orang tua jika ingin menikahi anaknya di usia muda, seperti pendapat Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran Kemendikbud Yudistira Wahyu Widiyasa mengatakan, "Yang menjadi salah satu hal yang ingin dicapai sekarang. Tercantum di Nawacita bahwa wajib belajar 12 tahun. Kegiatan yang mengarah ke wajib belajar 12 tahun sudah ada ya sejauh ini, dan terus kita upayakan agar berjalan maksimal". (<https://psmk.kemdikbud.go.id/konten/1906/kemdikbud-upayakan-wajib-belajar-12-tahun-melalui-pip> diakses 13 Januari 2018). Maka dengan adanya pendapat yang sudah dijelaskan, setiap anak seharusnya mengikuti upaya pemerintah untuk mempertahankan pendidikannya selama 12 tahun sehingga pribadi yang berintelektual dan dewasa tumbuh pada diri masing-masing individu.

Selanjutnya hal-hal yang dapat memperkuat buruknya pernikahan dini untuk dilakukan adalah faktor kesehatan. Perlu diketahui ketika meningkatnya jumlah pernikahan dini di Indonesia sudah pasti mengakibatkan tingginya angka persalinan ibu dibawah umur. Hal tersebut tentunya membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan ibu serta bayi. Kehamilan pada usia 10-14 tahun atau kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Penelitian terdahulu dalam jurnal Unikom mengenai “Dampak Melahirkan di Usia Muda” oleh Dwi Windawi (2010: 16) menyebutkan bahwa wanita yang masih muda usianya, panggulnya belum berkembang sempurna terlebih ibu yang hamil pada usia muda akan mengalami kekurangan cairan serta nutrisi dikarenakan perebutan antara tubuhnya dengan kebutuhan janin yang dikandungnya sehingga salah seorang kalah atau kedua-duanya kalah, jika bayinya yang kalah maka bayi akan lahir dengan berat badan kurang (*premature*), atau lahir dengan pertumbuhan otak yang kurang memadai.

Terlepas dari beberapa aspek yang sudah dijelaskan diatas Yogyakarta juga merupakan salah satu kota yang masih berupaya untuk mengurangi jumlah pernikahan dini, terlebih Yogyakarta juga termasuk kedalam predikat kota yang mengalami peningkatan jumlah pernikahan dini beberapa tahun belakangan ini. Menurut sosiolog Universitas Gadjah Mada yaitu Prof Partini kasus pernikahan dini paling banyak terjadi di

Kabupaten Gunungkidul sebanyak 11,29 persen, diikuti Kota Yogyakarta 7,79 persen, Bantul 7,30 persen, Kulonprogo 7,28 persen, dan Sleman 5,07 persen. (<http://www.netralnews.com/news/kesra/read/32849/gunung.kidul.tertinggi.kasus.pernikahan.dini> diakses 14 Januari 2018). Peningkatan angka pernikahan dini di Yogyakarta ini juga berdampak pada tingginya angka persalinan ibu usia remaja. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DIY didapatkan data persalinan usia remaja di Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Persalinan Usia Remaja di DIY

WILAYAH	USIA			
	10-14th	15-17 th	18-19 th	TOTAL
KOTA YK	2	32	58	92
BANTUL	5	161	198	364
KULONPROGO	1	38	68	107
GUNUNGKIDUL	1	123	281	405
SLEMAN	0	17	93	110
DIY	9	371	698	1078

Sumber : BPPM DIY Tahun 2016

Tingginya angka pernikahan dini yang ada di Yogyakarta terlebih pada Kabupaten Gunung Kidul menjadi pusat fokus bagi pemerintah untuk mengadakan upaya. Tetapi di sisi lain, Gunung kidul tercatat sebagai salah satu Kabupaten yang masuk Top 99 dari 3.413 daerah dalam lomba inovasi yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB RI tahun 2017, hal yang diusung terkait dengan kampanye penundaan pernikahan usia

dini. Posisi top tersebut tidak luput dari komitmen bersama antara pemerintah dan semua elemen masyarakat khususnya tingkat keluarga dan padukuhan dalam menekan angka pernikahan usia dini. Kecamatan Gedangsari dan Saptosari sebelumnya merupakan daerah dengan angka pernikahan usia dini yang cukup tinggi, namun bisa ditekan hingga menjadi 0 persen. "Salah satu kiat-kiat untuk mengurangi angka pernikahan usia dini di Kabupaten Gunungkidul adalah melakukan sosialisasi Ayo Tunda Pernikahan Dini dan menciptakan berbagai macam slogan. Karena slogan cukup mudah dibaca dan diingat, " Hal tersebut disampaikan dalam sambutan bupati, Badingah yang diwakili oleh wakil bupati, Immawan Wahyudi pada puncak peringatan Hari Kartini Tingkat Kabupaten Gunungkidul (<http://gunungkidul.sorot.co/berita-92990-sukses-kampanye-tunda-nikah-dini-gunungkidul-masuk-top-99.html> diakses 14 Januari 2018).

Di sisi lain keberhasilan salah satu kecamatan yaitu Saptosari dalam menanggulangi pernikahan dini ini ternyata dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat sendiri. Berdasarkan wawancara dengan Camat Saptosari, Jarot Hadiatmojo, SIP, Msi, kecamatan Saptosari merupakan kecamatan yang paling miskin diantara 18 kecamatan yang ada di Gunung Kidul. Kemiskinan tersebut menimbulkan banyak masalah lain diantaranya gizi buruk dan angka kematian bayi tinggi. Sehingga dengan kaitan tersebut pernikahan dini-pun menjadi salah satu penyebab kemiskinan terjadi pula. Lalu Jarot menjelaskan pernikahan dini terjadi

dikarenakan beberapa sebab yaitu budaya lokal atau kebiasaan masyarakat dan faktor pergaulan bebas. Maka berdasarkan pengamatan tersebut, Jarot mengumpulkan berbagai tokoh dan elemen masyarakat untuk membahas bagaimana cara mengatasi kasus pernikahan dini yang tinggi ini. Dibantu dengan LSM Rifka Anisa, kecamatan Saptosari akhirnya membentuk deklarasi untuk tidak mengizinkan terjadinya pernikahan dini kembali. Deklarasi tersebut didukung oleh berbagai elemen, yaitu KUA, Puskesmas, Kepala Desa, Lurah, serta seluruh sekolah. Pelaksanaan deklarasi ini dilakukan melalui berbagai tahapan hingga pada akhirnya angka pernikahan dini di Saptosari turun menjadi nol persen.

Melalui beberapa pertimbangan diatas mulai dari adanya UU No.52 Tahun 2009, mengenai Keluarga Berencana yang mana merupakan upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Kemudian adanya UU perkawinan yang menyebutkan anak dapat menikah berdasarkan batas usia yang telah ditentukan, serta pertimbangan bagaimana hak-hak anak dalam KHA yang wajib dipenuhi dan berhasilnya kecamatan Saptosari menurunkan angka pernikahan dini menjadi nol persen melalui program deklarasi membuat Pemerintah Yogyakarta semangat menggalakan program Pendewasaan usia Perkawinan (PUP) yang di inisiasi dan dibuat khusus oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (BPPM DIY). Program PUP

dicanangkan tahun 2016 dan direalisasikan hingga tahun 2017, hal ini merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. (https://bppm.jogjaprovo.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=348:kampanye-pendewasaan-usiaperkawinan&catid=31&Itemid=54 diakses 14 Januari 2018).

Berangkat dari kekhawatiran pemerintah dan BPPM, program PUP dijalankan pada seluruh kecamatan yang ada di DIY dan mengadopsi strategi kecamatan Saptosari yang telah berhasil menurunkan kasus pernikahan dini menjadi nol persen. Keberhasilan Saptosari menjadi landasan guna berjalannya program PUP, hal ini dikarenakan cara serta penyampaian atau komunikasi yang dianggap efektif telah dilakukan kepada masyarakat. Padahal jika kita telaah secara lebih luas sebenarnya program PUP sudah dicanangkan oleh BKKBN dan dijalankan selama bertahun-tahun. Tetapi hal yang membedakan PUP BPPM dan BKKBN adalah cara penyampaian dan strategi komunikasi yang dijalankan, karena diketahui berdasarkan hasil evaluasi program PUP BKKBN hanya mengarah pada program genre PIK R ataupun M tanpa adanya penyuluhan atau sosialisasi yang baik dan terarah (Zuraidah, 2016: 50 dalam Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes Volume VII Nomor 1 Tahun 2016).

Pentingnya sebuah strategi komunikasi bagi suatu perusahaan ataupun institusi sangat berpengaruh bagi citra yang akan didapat dari masing-masing lembaga tersebut. Strategi komunikasi dirancang untuk menjadi tolak ukur suatu keberhasilan dalam menjalankan suatu program. Dalam hal ini BPPM telah melaksanakan program PUP dan melakukan berbagai macam tahapan mulai dari perencanaan hingga tahapan mengevaluasi. Strategi tersebut dilakukan dengan cara yang unik melalui roadshow (penyuluhan dan deklarasi) dan bersifat persuasif, sehingga strategi komunikasi tersebut akan dilihat efektif atau tidaknya melalui keberhasilan program PUP di seluruh kecamatan di DIY ini.

Selanjutnya adanya program PUP yang berjalan, juga akan dipantau perkembangannya melalui usaha dari masing-masing bidang KB-KS yang ada pada tiap kabupaten. Hal tersebut dilakukan agar program lebih terarah dan dapat dilihat peningkatannya. Maka dari itu penulis juga mengambil salah satu fokus objek penelitian pada Kabupaten Kulonprogo. Hal ini berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak A Heru Triyono, SKM kepala Subbidang Pemberdayaan dan Advokasi, beliau mengatakan:

Pemantauan program PUP akan dilihat melalui seberapa aktif para bidang KB-KS dari masing-masing kabupaten yang telah ditetapkan. Berhasil atau tidaknya program PUP bukan hanya dari usaha BPPM saja tetapi seluruh elemen masyarakat yang ada pada kecamatan bahkan kabupaten tersebut harus berperan aktif dalam menjalankannya. Selain itu faktor berhasil atau tidaknya suatu program bukan hanya dari evaluasi angka pernikahan dininya naik atau tidak saja, tetapi masih banyak faktor lainnya seperti sudah sejauh mana masyarakat mengerti dan ikut andil dalam mengkampanyekan program PUP. Seperti kabupaten Kulonprogo

yang hingga saat ini sangat terlihat kesadarannya untuk menjalankan program PUP terlebih dalam hal KIE (Komunikasi, Informasidan Edukasi). Memang, Kabupaten Kulonprogo masih berada pada urutan keempat dalam hal jumlah pernikahan dini tetapi harapannya Kulonprogo dapat mewakili keberhasilan program PUP yang dijalankan BPPM yang mana dianggap masih seumur jagung bagi kami (wawancara pada Kamis 25 Januari 2018)

Selain berdasarkan sumber wawancara tersebut, jika kita teliti lebih lanjut sebenarnya kabupaten Gunung Kidul adalah salah satu kabupaten yang sangat baik untuk dijadikan objek penelitian ataupun informan yang tepat. Tetapi, faktanya sampai saat ini penelitian mengenai pernikahan dini di Gunung Kidul sudah sangat banyak diteliti sehingga bisa dikatakan jenuh. Contohnya seperti penelitian Fitriana Tsany yang berjudul “Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta 2009-2012)” dalam (Jurnal ilmiah Sosiologi Agama, Volume 9 No. 1, Januari-Juni 2015), Any Sundari dengan judul “Realitas Gadis Pantai Selatan Hari ini: Kajian Kebijakan Pernikahan Anak di Gunung Kidul Yogyakarta” (Jurnal Perempuan vol 21, No. 1, Februari 2016) dan Erina Hertanti dengan judul “Partisipasi Pelaku Pernikahan Usia Dini Dalam Program Keluarga Berencana di Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul” (Skripsi Fakultas Geografi dan Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada , 2016).

Berdasarkan beberapa temuan penelitian yang mewakili diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang bertemakan pernikahan dini banyak mengarah pada kabupaten Gunung Kidul ataupun kecamatan yang memang masih berada disekitar Gunung Kidul. Sehingga baik dikatakan

jika kecamatan ataupun kabupaten lain diteliti lebih mendalam untuk diketahui bagaimana proses pernikahan dini yang terjadi ditempat tersebut dan bukan hanya di Gunung Kidul.

Kemudian beberapa penelitian terdahulu mengenai strategi komunikasi pernah dilakukan oleh beberapa orang, seperti penelitian yang dilakukan oleh Herdiyana Ayu Susanti dengan judul “Strategi Komunikasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional”. Dalam penelitian tersebut Herdiyana mengatakan bahwa dalam rangka menyusun strategi komunikasi diperlukan suatu pemikiran dengan memperlihatkan faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat. Selain itu strategi komunikasi dalam mensosialisasikan sebuah program harus mencakup tiga unsur penting agar komunikasi berjalan efektif yaitu mulai dari daya tarik dan kredibilitas komunikator, karakteristik pesan serta media yang dipilih dan digunakan (Jurnal Komunikasi ASPIKOM Vol 2, No 4, Januari 2015: 247). Penelitian Herdiyana juga mengarah pada strategi komunikasi sebuah institusi sosial yang bersifat sama dalam mencapai tujuan programnya dengan BPPM DIY, tetapi BKKBN memang terpantau fokus pada tujuan akhir yaitu membangun keluarga yang berencana dalam setiap programnya.

Kemudian penelitian selanjutnya mengenai strategi komunikasi dilakukan oleh Andi Muhammad Irvan L, Andi Alimuddin Unde dan Muhammad Iqbal Sultan dengan judul “Strategi Komunikasi Badan Pertahanan Nasional Dalam Menyelesaikan Konflik Pertahanan di

Kabupaten Maros”. Mereka menyebutkan bahwa seorang perumus perlu untuk memperhatikan komponen-komponen strategi komunikasi. Adapun komponen yang dimaksud adalah komunikan sebagai sasaran komunikasi, media, pesan, dan komunikator. Strategi komunikasi yang dijalankan pun terbagi tiga, yaitu strategi komunikasi dalam organisasi, strategi komunikasi dengan instansi lain, dan strategi komunikasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan (Jurnal Komunikasi KAREBA Vol 3, No 1, Januari-Maret 2014:20). Jurnal ini juga menjelaskan proses yang terjadi dalam institusi jika mengalami konflik harus diadakan sebuah mediasi dan pemahaman khusus antar pihak-pihak yang terkait, sehingga penelitian ini sama-halnya dengan BPPM DIY yang akan membuat perencanaan strategi program PUP berdasarkan peraturan yang harus bekerjasama dengan beberapa lembaga maupun pihak-pihak yang terkait.

Dua penelitian tersebut digunakan sebagai acuan atau rujukan penulis guna menguraikan penelitian ini. Berbeda dengan dua penelitian diatas, adanya persamaan ataupun beberapa penjelasan membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana rancangan strategi komunikasi yang difokuskan melalui program PUP oleh BPPM DIY dengan melihat situasi dan kondisi pernikahan dini yang masih marak di seluruh kecamatan yang ada di Yogyakarta secara umum dan dengan mengambil satu contoh objek penelitian yaitu Kulonprogo secara khusus pada tahun 2017

B. Rumusan Masalah

Bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh BPPM DIY dalam menginformasikan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Kulonprogo tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan bagaimana strategi komunikasi BPPM DIY dalam menginformasikan program PUP di DIY khususnya Kulonprogo.
2. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat kinerja BPPM dalam melakukan strategi.
3. Menyatakan tanggapan masyarakat dari Kabupaten Kulonprogo terkait program dan strategi BPPM mengenai PUP.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam melakukan kajian-kajian komunikasi terutama pada kegiatan strategi komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam mengubah sikap dan pandangan masyarakat serta menjadi kontribusi ilmiah dan bahan referensi bagi mahasiswa yang berkepentingan untuk mengembangkan penelitian dalam bidang ilmu komunikasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi BPPM DIY, dapat menjadi masukan sebagai salah satu bahan acuan dalam melakukan pertimbangan sebuah proses pengambilan

keputusan yang berhubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan strategi komunikasi khususnya dalam menanggulangi kasus pernikahan dini dan pengembangan program pendewasaan usia perkawinan selanjutnya.

- b. Bagi masyarakat Kulonprogo, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, edukasi dan mengajak masyarakat untuk mencegah pernikahan dini dan mengikuti program PUP dari dinas maupun pemerintah setempat sesuai dengan peraturan yang sudah dicanangkan pemerintah.

E. Kajian Teori

Dalam penelitian ilmiah ini dibutuhkan sebuah kajian teori yang disusun berdasarkan latar belakang permasalahan. Penulis menggunakan kajian teori tentang strategi komunikasi yang diharapkan dapat menjelaskan isi dari karya ilmiah ini.

1. Strategi Komunikasi

Menurut Onong Uchjana Effendy (1984: 32) strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Menurut Hoveland (1948) dalam Wiryanto (2004: 6) komunikasi adalah “*the process by*

which an individual (the communicator) transmit stimuli (usually verbal symbols) to modify, the behaviour of individu” (proses di mana individu mentransmisikan stimulus untuk mengubah perilaku individu yang lain. Oleh karena itu strategi komunikasi pada hakikatnya adalah perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Effendy, 1986: 33)

Sebuah strategi yang merupakan aktivitas komunikasi, tentunya memiliki tujuan ataupun efek yang didapat. Adapun beberapa dampak ataupun tujuan dalam aktivitas komunikasi tersebut dijelaskan oleh Tommy Suprpto (2009: 12) sebagai berikut:

- a. Memberikan Informasi, meningkatkan pengetahuan, menambah wawasan. Tujuan ini sering disebut tujuan yang kognitif.
- b. Menumbuhkan perasaan tertentu, menyampaikan pikiran, idea tau pendapat. Tujuan ini sering disebut tujuan afektif.
- c. Mengubah sikap, perilaku dan perbuatan. Tujuan ini sering disebut dengan tujuan konatif atau psikomotorik.

Terlepas dari hal tersebut Barnard dalam Sopian (2016: 3) mengatakan komunikasi merupakan kekuatan dari suatu organisasi. Pada dasarnya strategi ataupun manajemen yang sesuai dengan tujuannya sangat diperlukan dalam membangun citra serta hubungan baik dengan publiknya. Argenti (2007: 22) dalam bukunya yang berjudul “*Strategi Corporate Communication*” menyebutkan bahwa terdapat tiga hal yang dapat mensukseskan strategi organisasi, yaitu:

1. *Determining what the objectives are for the particular communication*

Pengertian kata-kata diatas adalah menentukan tujuan dari sebuah komunikasi. Adapun dalam menentukan suatu tujuan, sebuah organisasi harus mengerti terlebih dahulu hal apakah yang ingin dicapai.

2. *Deciding what resources are available for achieving those objectives*

Hal kedua yang menjadi pertimbangan dalam strategi organisasi adalah menentukan sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan. Sumber-sumber yang dimaksud termasuk seperti Sumber Daya Manusia (SDM), biaya ataupun waktu.

3. *Diagnosing the organization's reputation*

Menentukan reputasi dalam suatu organisasi adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Hal tersebut dikarenakan reputasi organisasi merupakan suatu pandangan guna kredibilitas yang akan mempengaruhi keberhasilan *planning* yang sudah dibuat.

Melanjutkan pernyataan mengenai organisasi diatas, strategi dalam mencapai tujuannya memiliki sebuah taktik melalui perencanaan dan manajemen komunikasi yang baik, berikut beberapa poin penting dari perencanaan maupun manajemen komunikasi dalam strategi komunikasi:

a. Perencanaan Komunikasi

Strategi komunikasi yang sudah memiliki tujuan harus memiliki perencanaan yang terstruktur dengan baik yang mana perencanaan ini harus terus dikaitkan dengan temuan fakta. Rencana bertujuan untuk membuat sesuatu terwujud atau mencegah sesuatu terjadi, untuk mengeksploitasi situasi atau memperbaiki situasi (Cutlip, Scott M, dkk 2006: 362). Definisi lain juga diungkapkan oleh Hafied Cangara, menurutnya “perencanaan komunikasi berperan sebagai penuntun usaha atau kegiatan komunikasi yang dilakukan sepanjang proyek dilaksanakan, ia menjadi dokumen kerja yang selalu diperbarui secara periodik sesuai dengan perubahan kebutuhan khalayak. Ia menjelaskan bagaimana cara menyebarluaskan pesan yang tepat dari komunikator dan kepada khalayak yang tepat, melalui saluran yang tepat dengan waktu yang tepat”. (Cangara, 2013: 44).

Berdasarkan hal tersebut Alo Liliweri (2011: 258) mengemukakan terdapat sepuluh langkah perencanaan komunikasi, yaitu:

1. Analisis isu dan peranan komunikasi

Pada langkah ini setiap organisasi akan mencari tau bagaimanakah permasalahan ataupun isu yang berada pada masyarakat sesuai dengan fakta maupun riset. Seluruh data akan dikumpulkan dan ditarik kesimpulan bahwa organisasi

tersebut harus mempunyai keterlibatan langsung dalam masalah yang sedang muncul dimasyarakat dan memiliki peranan penting dalam masalah tersebut.

2. Seleksi kelompok sasaran/audiens dan *stakeholders*

Sasaran perencanaan yang sesuai merupakan salah satu keberhasilan organisasi dalam membuat sebuah program. Adapun dalam menyeleksi kelompok sasaran, biasanya sasaran akan dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Sasaran primer : sasaran atau orang yang akan terlibat langsung dalam halmengubah perilaku.
- b. Sasaran sekunder : sasaran atau orang yang akan saling berpengaruh terhadap sasaran primer yang mana menjadi salah satu pendukung terpenting yaitu masyarakat sekitar secara umum.
- c. Sasaran tersier : sasaran tersier merupakan sasaran yang menuju pada *stakeholder-stakeholder* pembuat kebijakan publik. Stakeholder dianggap mampu untuk menjaga dan membatasi peraturan agar tejalin komunikasi yang efektif dan program yang sempurna.

3. Menentukan target komunikasi

Setiap perencanaan akan membuat sebuah target atau batasan yang akan dicapai. Target tersebut akan

mengendalikan batasan dari tujuan yang harus diperoleh ataupun lebih.

4. Mengembangkan strategi dan seleksi mitra

Memanfaatkan segala peluang yang ada, berunding dengan mitra ataupun *stakeholder* yang akan bekerjasama dalam proses komunikasi tersebut.

5. Menentukan pesan

Pesan komunikasi merupakan pesan yang mempunyai tujuan tertentu. Biasanya pesan ini disampaikan kepada komunikan melalui bahasa, gambar, warna dan lain-lain. Lambang yang paling banyak digunakan dalam komunikasi ialah bahasa karena hanya bahasalah yang dapat mengungkapkan pikiran dan perasaan, fakta dan opini, hal yang konkret dan abstrak, pengalaman yang sudah lalu dan kegiatan yang akan datang, dan sebagainya (Effendy, 1984: 38)

6. Seleksi tujuan utama komunikasi

Mencari tujuan yang sangat mendasar dan tertuju tepat sesuai target merupakan suatu keberhasilan komunikasi. Sehingga dari banyaknya tujuan yang telah diciptakan dapat dilihat dan diseleksi kembali tujuan mana yang paling sesuai.

7. Mengorganisasikan komunikasi melalui pertemuan bersama dengan mitra

Sebelum melaksanakan sebuah program. Setiap organisasi seharusnya bertemu terlebih dahulu dengan para pihak yang akan menjadi *stakeholder* mereka atau yang mewakili sehingga seluruh perencanaan bernilai efektif sesuai dengan target dan tujuan. Kemudian akan diberi pengertian atas tanggung jawab dari masing-masing pihak yang saling berkaitan.

8. Perencanaan kegiatan

Dalam pertemuan tersebut, akan dibahas bagaimana waktu yang tepat, tempat yang tepat, siapa saja yang harus terlibat, media apa yang paling tepat dan sebagainya.

9. Aktivitas penganggaran

Mempertimbangkan anggaran yang akan digunakan dalam suatu program merupakan suatu upaya yang harus dilakukan. Anggaran harus disusun sesuai dengan kebutuhan yang cukup.

10. Pemantauan dan evaluasi

Dalam sebuah perencanaan komunikasi, cara evaluasi harus sudah dipersiapkan supaya program yang berjalan dapat memiliki feedback yang baik atau sebaliknya. Melalui hasil pemantauan dan evaluasi akan terlihat kekurangan dan kelebihan dari program yang dilaksanakan.

b. Manajemen Komunikasi

Beberapa fungsi manajemen dalam suatu organisasi sangat diperlukan bagi menyaring dan menyatakan tolak ukur keberhasilan suatu program. Sebuah komunikasi membutuhkan suatu pendekatan sistem yang saling mempengaruhi terkait dalam hal manajemen komunikasi, hal ini mengingat bahwa semua fungsi-fungsi manajemen maupun komunikasi merupakan suatu proses yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Faktor tersebut juga dikarenakan kegiatan-kegiatan organisasi akan saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Dalam pelaksanaannya, pendistribusian pesan dan informasi yang disampaikan untuk mencapai tujuan dapat dikatakan sebagai aktivitas komunikasi yang mana guna mencapai tingkatan keberhasilan dibutuhkan suatu manajemen. Menurut Tommy (2009: 137) manajemen merupakan sebuah proses dengan memanfaatkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan/pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi. Melalui fungsi-fungsi tersebut, pesan atau informasi akan ditata serta diatur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dikemas melalui berbagai macam kegiatan komunikasi agar sasaran dapat terjalankan sesuai dengan rencana.

Selanjutnya Ruslan dalam bukunya yang berjudul "*Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi*" (1997 : 23)

mengungkapkan ada beberapa fungsi manajemen dan proses dalam kegiatan komunikasi, yaitu:

a. Perencanaan (*Planning*)

Pada fungsi yang utama yaitu perencanaan akan mencakupi penetapan akan sebuah tujuan dan standar, selain itu pada tahapan ini juga akan dilakukan ramalan-ramalan atau prediksi yang akan terjadi melalui data-data yang sudah dikumpulkan. Fungsi perencanaan secara lebih luas sudah dibahas pada poin kajian teori sebelumnya, hal ini karena perencanaan yang baik sangat kuat kaitannya dengan strategi.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi kepada masing-masing pihak yang bertanggung jawab. Selain itu fungsi ini juga akan membantu dalam menentukan bagian, mendelegasikan dan menetapkan jalur suatu wewenang dan sistem komunikasi sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya.

c. Mengkomunikasikan (*Communicating*)

Komunikasi adalah faktor yang sangat penting untuk dapat melaksanakan fungsi manajemen secara efektif. Komunikasi atau mengkomunikasikan adalah cara yang digunakan instansi agar target mengetahui atau menyadari tujuan dan rencana dari pihak pertama supaya pihak-pihak serta target dan sasaran

dapat berperan secara penuh dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Cara tertentu ataupun media yang paling efektif dalam menghindari noise akan dipilih dan digunakan agar program dapat berjalan maksimal sesuai dengan harapan dan prediksi yang telah dirancang.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan proses untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan sudah tercapai atau belum. Hal ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. (Morissan, 2008:167)

e. Penilaian (*Evaluating*)

Langkah terakhir dalam sebuah proses atau fungsi manajemen adalah mengevaluasi program. Hal ini dilakukan dengan berdasarkan penilaian atas persiapan, implementasi dan hasil dari program. Selain itu evaluasi dapat diukur melalui menampung umpan balik dari target kepada pihak manajemen.

2. Strategi Komunikasi pada Instansi Pemerintahan

Mintzberg dalam Liliweri (2011: 242) mengatakan strategi merupakan suatu keputusan yang tepat, jelas, komprehensif, valid atau apapun namanya, sebagai dasar filosofis dan praktis bagi kita untuk

berpikir, berperilaku, beraktivitas dan bertindak. Di sisi lain Code (1959) mendefinisikan komunikasi sebagai proses yang membuat sesuatu dari yang semula dimiliki oleh seseorang atau monopoli seseorang menjadi dimiliki dua orang atau lebih (Soyomukti, 2010: 57). Sehingga strategi komunikasi bagi suatu organisasi adalah cara berpikir atau beraktivitas bagi komunikator untuk membuat suatu pemikiran yang semula hanya dimiliki oleh seorang menjadi dimiliki dua orang atau lebih.

Dalam penelitian ini, BPPM merupakan suatu organisasi atau instansi pemerintah yang ada di Indonesia. Instansi pemerintah adalah sebutan bagi satuan kerja atau organisasi yang meliputi lembaga pemerintahan pusat ataupun daerah yang memiliki tugas ataupun wewenang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sehingga suatu instansi jika akan menjalankan strategi komunikasi dalam suatu program pasti akan terstruktur sempurna dan memiliki kesiapan maupun konsep yang lebih matang.

Pengelolaan informasi dan komunikasi dalam suatu instansi atau pemerintah daerah dapat dilihat dari teori pengurangan ketidakpastian, yang mana dalam teori pengurangan ketidakpastian tersebut terdapat tiga indikator yang sangat mempengaruhi suatu strategi. Berikut tiga indikator strategi komunikasi dalam pemerintah daerah (Kasemin, 2016: 152) :

- a. Dikatakan menggunakan strategi komunikasi pasif. Ketika pemerintah daerah dalam melakukan penyelenggaraan layanan informasi, hanya melakukan pengumpulan data yang bersifat observasional saja.
- b. Dikatakan menggunakan strategi komunikasi aktif. Ketika daerah memiliki kecenderungan untuk cepat tanggap terhadap kebutuhan informasi masyarakat di daerahnya.
- c. Dikatakan menggunakan strategi komunikasi interaktif. Ketika pemerintah daerah merespon secara cepat/dinamis terhadap semua kebutuhan informasi dan komunikasi masyarakat di daerahnya dengan melakukan pengelolaan informasi dan komunikasi berbasis *e-government*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif. Riset kualitatif adalah riset yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya (Kriyantono, 2008: 56). Menurut Brannen dalam Endraswara (2006: 82) secara epistemologis ada sedikit perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif, penelitian kuantitatif selalu menentukan data variabel-variabel, kategori ubahan bahkan hipotesis tertentu sedangkan penelitian kualitatif biasanya

mengejar data verbal yang lebih mewakili fenomena dan bukan angka-angka yang penuh prosentase dan rerata yang kurang mewakili seluruh fenomena.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang didasarkan oleh pertanyaan dasar yang kedua yaitu *bagaimana* atau dapat disebut dengan penjelasan untuk mengetahui bagaimana peristiwa tersebut terjadi (Gulo, 2002: 19). Sehingga, jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang melukiskan atau (mendeskripsikan) sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antarvariabel. Penelitian ini dimaksudkan sebagai upaya eksplorasi dan klarifikasi suatu fenomena atau kenyataan sosial, adapun hasil penelitian ini menjadi masukan untuk penelitian lanjutan. (Maskur, 2015: 67).

Oleh karena itu penulis meneliti secara mendalam tentang strategi komunikasi yang dilakukan oleh BPPM dalam menginformasikan dan mengajak masyarakat untuk mengurangi jumlah pernikahan dini melalui program PUP dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi DIY yang beralamatkan di jalan Tentara Rakyat No 31 Yogyakarta, 55231. Telp (0274) 562714, dengan alamat website <https://bppm.jogjaprov.go.id>

3. Informan Penelitian

Informan yang dipilih diambil dengan menggunakan cara *purposive sampling*. Purposif sampel adalah suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus (Siyoto dan Sodik, 2015: 66). Menurut Endang S Sari (1993: 12) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel tidak secara random tapi dilakukan dengan berdasarkan pada kebijakan penelitian itu sendiri. Purposive sampling dilakukan bila diperlukan responden dengan persyaratan khusus. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel yang dipilih dengan sengaja dengan tujuan dan pertimbangan tertentu.

Dalam penelitian ini, penulis memerlukan informasi dari para informan yang memahami segala sesuatu mengenai program PUP yang dilaksanakan oleh BPPM DIY, adapun kriteria informan yang akan ditetapkan diharapkan dapat membantu penulis dalam menemukan jawaban dan informasi terkait program tersebut.

- a. Kriteria informan dari pelaksana program PUP
 1. Bekerja pada BPPM DIY
 2. Berada pada bidang khusus yang dapat menangani permasalahan pernikahan dini dan bertugas melakukan pendekatan dan presentasi ke masyarakat
 - a. Drg, Retno Nurmawati, M.Kes (Kepala Bidang Keluarga Berencana)

- b. A. Heru Triyono, SKM (Kepala Subbidang Pemberdayaan dan Advokasi)
 - c. Dra. Endah Wahyuni (Kepala Subbidang Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan (PKOP))
3. Membuat, memahami dan terlibat langsung dalam perencanaan konsep strategi komunikasi yang dilakukan oleh BPPM DIY
 4. Memahami dan terlibat dalam pelaksanaan strategi komunikasi yang dilakukan oleh BPPM DIY
- b. Kriteria informan sebagai stakeholder atau peserta program PUP :
1. Berdomisili di Kulonprogo dengan alasan BPPM DIY hanya melaksanakan programnya pada seluruh kecamatan dan dipantau secara langsung melalui bidang KB masing-masing Kabupaten. Untuk kabupaten Kulonprogo sendiri informan yang akan dipilih adalah Drs. Mardiya (Kasubid Advokasi Konseling dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan PMPDP dan KB Kabupaten Kulonprogo)
 2. Terlibat dalam pelaksanaan program PUP yang dilakukan oleh BPPM DIY
 3. Bekerja pada instansi yang menjadi pusat *controlling* BPPM DIY dalam pelaksanaan program PUP

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa teknik guna mengumpulkan data yang mana akan saling melengkapi satu sama lain. Menurut Catherin Marshall dan Gretchen B. Rossman (1995) dalam (Ghony, D dan Almanshur, F, 2012: 164) pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer, dan lebih banyak pada teknik observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi (*the fundamental methods relied on by qualitative researchers for gathering information are, participation in the setting, direct observation, indepth interviewing, document review*). Sehingga dengan adanya penjelasan tersebut penulis akan memilih dua metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah wawancara semiterstruktur atau tidak terstruktur dan berlangsung selama paling tidak satu jam dan bertujuan untuk mengumpulkan deskripsi yang mendalam dari responden (West, Richard dan Lynn H Turner, 2008: 83). Bagi peneliti, wawancara mendalam ini diharapkan menjadi sebuah kolaborasi yang baik antara peneliti dan partisipan sehingga data-data yang bersifat faktual, informasi yang lengkap serta keleluasaan responden dalam menjawab menjadi suatu hal yang penting bagi pewawancara dan orang yang diwawancarai.

Pada kenyataan dilapangan, penulis akan mewawancarai beberapa pihak yang dapat memberikan informasi sebanyak-banyaknya terkait strategi komunikasi program PUP yang dicanangkan oleh BPPM DIY baik itu dari bidang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ikut terlibat langsung dalam program PUP maupun masyarakat yang turut menjadi stakeholder dari program tersebut.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi atau metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang biasa terjadi dalam riset-riset historis, metode ini bertujuan untuk menggali data-data masa lampau secara sistematis dan objektif (Kriyantono, Rachmat, 2008: 120). Dokumentasi adalah catatan yang sudah berlalu bisa berbentuk tulisan (catatan harian, cerita peraturan, kebijakan), ataupun dokumen berbentuk gambar (foto, gambar hidup, sketsa) (Iskandar dkk, 2014: 43 dalam Jurnal Komunikasi Pembangunan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2014).

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengumpulan data secara studi dokumentasi merupakan suatu hal yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai media tulisan ataupun gambar agar mempermudah penulis menggali data-data masa

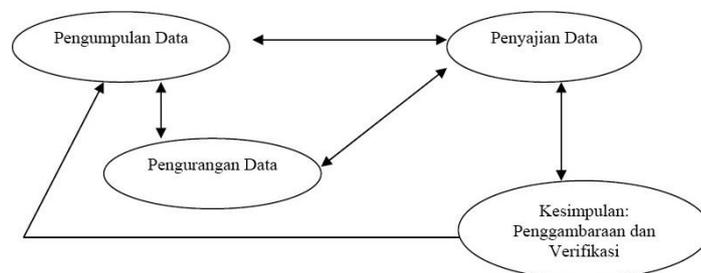
lampau. Peneliti akan mengambil data-data dokumentasi dari BPPM DIY baik itu adalah dokumen tulisan atau kebijakan serta foto kegiatan dalam pelaksanaan program.

5. Teknik Analisis Data

Tahap analisis data memegang peranan penting dalam riset kualitatif, yaitu sebagai faktor utama penilaian kualitas baik tidaknya suatu riset. Bogdan dan Biklen (2007) dalam Yaumi, M dan Damopolii, M (2016: 132) menyebutkan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan secara sistematis terhadap transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan yang memungkinkan peneliti menghadirkan temuan.

Miles dan Huberman dalam Yaumi, M dan Damopolii, M (2016: 137) mengembangkan proses analisis data yang dipandang sangat esensial dalam penelitian kualitatif. Proses analisis data tersebut digambarkan seperti berikut :

Gambar 1.1



Sumber : Yaumi, M dan Damopolii, M (2016: 137)

Dari gambar tersebut Miles dan Huberman mengatakan bahwa teknik analisis interaktif dipahami sebagaimana tiga aliran yang akan beraktivitas secara bersamaan yaitu *data reduction* (reduksi/pengurangan data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/ verification* (kesimpulan). Tiga proses ini akan berjalan dengan berdasarkan pengumpulan data-data yang peneliti lakukan sejak awal sampai pada tahapan kesimpulan, berikut penjelasan tahapan tersebut secara lebih lengkap:

a. *Data reduction* (reduksi/pengurangan data)

Reduksi data adalah memilah-milah data yang tidak beraturan menjadi potongan-potongan yang lebih teratur dengan mengoding, menyusunnya menjadi kategori (memoing), dan merangkumnya menjadi pola dan susunan yang sederhana (Daymon, Christine dan Immy Holloway, 2008: 369). Reduksi data dilakukan agar penulis dapat memilih secara lebih rinci dan lebih mudah.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Menurut Miles dan Huberman dalam Siyoto, Sandu dan Sodik, M.A (2015: 123) penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan dengan alasan

data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

c. *Conclusion drawing/ verification* (penarikan kesimpulan atau verifikasi)

Tahapan yang terakhir pada proses analisis interaktif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahapan ini peneliti akan dapat menjawab permasalahan penelitian. Jawaban yang akan didapat berdasarkan data-data yang sudah diolah dan diteliti akan ditarik kesimpulan sehingga hubungan persamaan atau perbedaan menjadi makna data yang kredibel atau jelas. Kemudian data akhir inilah yang akan digunakan dalam penelitian sebagai data yang terverifikasi.

6. Validitas Data

Validitas data digunakan untuk mengukur seberapa benar penelitian tersebut. Pada penelitian kualitatif, penilaian validitas data biasanya terjadi sewaktu peneliti turun ke lapangan untuk mengumpulkan data dan sewaktu proses analisis interpretasi data (memiliki, memilih, mengelompokkan data yang ada). Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan jenis *trustworthiness* yang mana jenis ini adalah jenis yang menguji kebenaran dan kejujuran subjek dalam mengungkap

realitas menurut apa yang dialami, dirasakan atau dibayang-bayangkan (Kriyantono, 2008: 71). Dalam *trustworthiness*, terdapat analisis triangulasi yang selalu digunakan pada metode penelitian kualitatif.

Menurut Rachmat Kriyantono (2008: 72) analisis triangulasi yaitu menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya) yang tersedia. Dalam analisis ini akan di *cross-check* jawaban subjek dengan dokumen yang ada, sehingga pada prinsipnya informasi yang dikumpulkan pada teknik triangulasi dicari dan dibandingkan dari sumber-sumber yang berbeda supaya tidak terjadi bias makna dari masing-masing kelompok.

Maka dengan adanya penjelasan tersebut peneliti akan menggunakan teknik triangulasi melalui membandingkan hasil wawancara dari informan baik dari pihak badan pemerintahan terkait selaku pelaksana program dengan masyarakat selaku stakeholder. Kemudian peneliti juga akan membandingkan data-data tersebut dengan isi dokumentasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Sehingga, setelah proses triangulasi data dilakukan, akhirnya data dapat disajikan dan ditarik menjadi kesimpulan dan saran yang pasti dibutuhkan.